



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-79.03.04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS HUKUM AHLI MADYA MELALUI PENYESUAIAN//INPASSING  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KP.03.04-22 tanggal 25 Agustus 2021, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya melalui Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
  - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1155 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MADYA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

**Tembusan:**

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : M.HH-79.03.04 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Desember 2021

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	AHMAD KHUMAIDI, S.H., M.Hum. NIP. 196608301994031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	144
2.	YUDI ADRIANTO, S.H., M.H. NIP. 196407211991031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	144
3.	Drs. RUSTAM EFENDI, S.H., M.Si. NIP. 196412311991031008	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	84
4.	ILSONI JONIADI, S.H., M.Si. NIP. 196506221989031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	144
5.	GATOT JOKO NUGROHO, S.H., M.Si. NIP. 197601072001121001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	144
6.	DENDY LESMANA ELLION, S.H., M.Si. NIP. 197407302001121001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II pada Balai Harta Peninggalan Semarang	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	114
7.	DEVY WIJAYANTI, S.H., M.H. NIP. 197001181991032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	84
8.	HEMPY JUNIUS WELEM POYK, S.H., M.H. NIP. 197306122002121001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	84

9.	DIANA YULI ASTUTI, S.H., M.H. NIP. 197907091999032001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	54
10.	RUSMILAH, S.H., M.H. NIP. 196512231986032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	54
11.	DWI AGUSTINE KURNIASIH, S.H., M.H. NIP. 198008022003122001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan II Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Analisis Hukum Ahli Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	54
12.	MOHAMMAD RUSDIYANTO MUIN, S.H., M.H. NIP. 197606132002121001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	54
13.	ZULHENDRI FAISAL, S.H., M.H. NIP. 196512231989031002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	9
14.	NOVENDRA, S.H., M.H. NIP. 197811052000031001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	9
15.	MARIA ESTHERALDA, S.H., M.Si. NIP. 197810262005012001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
YASONNA H. LAOLY